



DOKUMEN KETERKAITAN TAHUN 2026

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	9,60%		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	735.920
								Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2.454.000
								Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang	734.600
								Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	8.760.000
								Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial			Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	455.171.344

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjajaran Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjajaran Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	9,60%		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	972.943.000
								Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.738.000
								Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.389.000
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15.684.500
											Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8.028.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	9,60%		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	6.437.000
								Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.748.000
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.748.000
								Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.749.000
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.212.000
											Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20.227.000
											Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	9,60%		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.522.000
								Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	42.125.000
								Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	69.955.661
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.500.000
											Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjajaran Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjajaran Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	9,60%		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi <u>kebutuhan dasarnya</u>	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5.612.000
								Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	5.675.000
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000
								Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
											Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
											Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000
											Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6.659.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjajaran Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjajaran Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	9,60%		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	5.319.820
								Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9.089.000
								Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	58.391.880
											Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 198 Usulan Aspirasi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.669.542.600
											Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	10.787.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	9,60%		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	31.800.000
								Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	6.947.000
								Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.400.000
											Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	91.200.000
											Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4.100.000
									Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	96.806.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhannya	9,60%		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	13.035.000
											Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	66.643.372
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100%		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	23.222.200
												Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	107.807.267
												Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	32.227.760
												Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	222.185.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	0,239		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	26.133.200
								Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan	20.312.500
											Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/dunia usaha/media yang diadvokasi dan didampingi dalam	20.840.000
											Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan	142.782.084
											Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek	49.850.000
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,1		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.510.000
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	1.700.000
											Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.350.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,1		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Ktp dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan Ktp Kewenangan Provinsi	27.750.000
											Penyusunan kebijakan pencegahan Ktp dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan	27.750.000
									Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Ktp dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan	19.450.000
											Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	13.500.000
											Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	74.600.000
											Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	7.000.000
											Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	93.099.240
											Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	35.303.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,1		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	20.400.000
							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang beperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	349.270.260
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	38.510.000
											Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	13.243.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU			
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,1		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	23.982.000			
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1.700.000			
							2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pembuat kebijakan dan pembuat keputusan penting Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembuat kebijakan dan pembuat keputusan penting yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	27.750.000			
											Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	27.750.000			

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,1		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	17.629.720
								2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	18.750.000
											Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000
											Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	19.450.000
											Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	9.000.000
											Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	39.507.000
											Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	42.500.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,1		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	10.000.000
											Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	32.875.000
											Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	32.915.000
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83,67	83,67	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.166.000
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.528.000
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.527.835.471
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.152.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83,67	83,67	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.030.000
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.550.000
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	228.743.952
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62.921.508
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.000.000
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.040.000
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.120.000
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.114.174
											Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.430.000

SASARAN KOTA	IKU KOTA	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET 2026	CAPAIAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83,67	83,67	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	201.750.000
											Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	158.000.000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.743.558
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132.090.000
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23.000.000
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65.200.000
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			67.104.000
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			39.500.000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79.100.000		